



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Juni 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG PRASETYO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS**
3. NHK : **766893**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 98 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/100 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.000.000

1. MOBIL, NISSAN SV LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 138.352.786**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 776.352.786**III. HUTANG** Rp. 50.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 726.352.786

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.